Digital *Citizenship* dan Partisipasi Politik Generasi Z di Kota Bandung

Muhammad Yuda Ramadhan[1]
[1]Universitas Pendidikan Indonesia
Korespondensi Email: myudar@student.upi.edu

Abstract

Digital media have transformed political participation by expanding how young citizens access information, express preferences, build networks, and connect online engagement with offline action. This study develops an integrated framework combining modified UTAUT, digital citizenship, and Connective Action Theory to explain Generation Z political participation in Bandung City. The analysis uses a reconstructed/simulated pilot dataset of 512 observations to demonstrate structural-model testing. Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, digital citizenship, behavioral intention, and political participation were modeled as latent constructs. Digital citizenship was operationalized through digital access and competence, critical political information literacy, digital ethics and responsibility, political awareness, and digital civic engagement. The reconstructed model showed acceptable fit (RMSEA = 0.046; CFI = 0.978; TLI = 0.972). Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and digital citizenship positively predicted behavioral intention, while behavioral intention and digital citizenship positively influenced political participation. Behavioral intention mediated the effects of the four UTAUT determinants, whereas digital citizenship negatively moderated these relationships. These findings suggest that stronger digital citizenship reduces dependence on ease of use, external support, and social pressure, indicating a shift toward more autonomous, issue-oriented, and hybrid political participation. The study highlights digital citizenship as a substantive political capacity in contemporary digital democracy.

Keywords: *Digital Citizenship; Political Participation; Generation Z; Digital Politics; Social Media; UTAUT; Connective Action; Bandung City.*

Abstrak

Media digital telah mengubah partisipasi politik dengan memperluas cara warga muda memperoleh informasi, mengekspresikan preferensi, membangun jaringan, dan menghubungkan keterlibatan daring dengan tindakan luring. Penelitian ini mengembangkan kerangka integratif yang menggabungkan modified UTAUT, kewarganegaraan digital, dan Connective Action Theory untuk menjelaskan partisipasi politik Generasi Z di Kota Bandung. Analisis menggunakan *reconstructed/simulated* pilot dataset sebanyak 512 observasi untuk mendemonstrasikan pengujian model struktural. *Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions*, kewarganegaraan digital, *behavioral intention*, dan partisipasi politik dimodelkan sebagai konstruk laten. Kewarganegaraan digital dioperasionalisasikan melalui akses dan kompetensi digital, literasi politik digital kritis, etika dan tanggung jawab digital, kesadaran politik, serta keterlibatan kewargaan digital. Model rekonstruksi menunjukkan kelayakan yang baik (RMSEA = 0,046; CFI = 0,978; TLI = 0,972). *Performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions*, dan kewarganegaraan digital berpengaruh positif terhadap behavioral intention, sedangkan behavioral intention dan kewarganegaraan digital berpengaruh positif terhadap partisipasi politik. *Behavioral intention* memediasi pengaruh empat determinan UTAUT, sementara kewarganegaraan digital memoderasi hubungan tersebut secara negatif. Temuan ini

menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital yang lebih kuat mengurangi ketergantungan pada kemudahan, dukungan eksternal, dan tekanan sosial serta mendorong partisipasi politik yang lebih mandiri, berbasis isu, dan bersifat hibrida.

Kata kunci: Kewarganegaraan Digital; Partisipasi Politik; Generasi Z; Politik Digital; Media Sosial; UTAUT; Connective Action; Kota Bandung.

Pendahuluan

Transformasi digital telah menggeser politik dari arena yang didominasi organisasi formal, media massa, dan pertemuan fisik menuju lingkungan komunikasi yang berlapis. Media sosial tidak hanya mempercepat distribusi informasi politik, tetapi juga menyediakan infrastruktur bagi warga untuk merespons isu publik, membangun jejaring, berinteraksi dengan aktor politik, dan memobilisasi dukungan. Dalam perkembangan tersebut, politik digital perlu dipahami bukan sekadar penggunaan internet untuk tujuan politik, melainkan sebagai perubahan pada cara kekuasaan, komunikasi, dan partisipasi diorganisasi (Chadwick & Howard, 2009; Coleman & Freelon, 2015; Karatzogianni et al., 2023)

Konsep partisipasi politik juga mengalami perluasan. Definisi klasik menempatkan partisipasi sebagai tindakan warga untuk memengaruhi pemerintah atau proses politik (Hooghe, 2014; Milbrath & Goel, 1977), sementara era digital memperluas repertoarnya melalui diskusi politik daring, berbagi konten, hashtag activism, petisi digital, interaksi dengan pejabat, hingga mobilisasi yang berawal di platform dan berlanjut di ruang fisik (Fox, 2014; Gibson & Cantijoch, 2013; Ruess et al., 2021; Van Deth, 2014). Karena itu, pemisahan absolut antara partisipasi daring dan luring semakin sulit dipertahankan. Bentuk-bentuk baru justru muncul sebagai kombinasi keduanya.

Perubahan tersebut sangat relevan bagi Generasi Z. Kelompok ini tumbuh dalam lingkungan dengan internet, telepon pintar, dan platform sosial sebagai bagian rutin dari kehidupan sehari-hari(Szymkowiak et al., 2021; Turner, 2015). Mereka memperoleh informasi politik melalui banyak jalur sekaligus dan mampu bergerak cepat dari konsumsi informasi menuju ekspresi personal. Namun, familiaritas dengan teknologi tidak identik dengan kewarganegaraan digital. Paparan tinggi terhadap konten politik juga dapat disertai misinformasi, polarisasi, ujaran kebencian, tekanan kelompok, dan partisipasi simbolik yang tidak selalu berkembang menjadi keterlibatan substantif.

Kewarganegaraan digital memberikan kerangka untuk mengatasi keterbatasan pendekatan yang menyamakan partisipasi digital dengan intensitas penggunaan teknologi. Mossberger, Tolbert, dan McNeal (2007) menekankan kapasitas untuk berpartisipasi dalam masyarakat melalui ruang *daring*, sedangkan Choi (2016) menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital bersifat multidimensional, mencakup etika, literasi media-informasi, keterlibatan, dan resistensi kritis. Jones dan Mitchell (2016) juga menunjukkan pentingnya perilaku hormat di ruang digital dan keterlibatan kewargaan daring. Dalam penelitian ini, konsep tersebut diperluas ke ranah politik melalui lima dimensi: akses dan kompetensi digital, literasi politik digital kritis, etika dan tanggung jawab digital, kesadaran politik, serta keterlibatan kewargaan digital.

Untuk menjelaskan bagaimana persepsi terhadap teknologi berubah menjadi niat dan perilaku politik, penelitian ini mempertahankan Modified Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). UTAUT menempatkan performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating conditions sebagai determinan utama niat dan penggunaan teknologi (Venkatesh et al., 2003, 2012, 2016). Artikel acuan (Amin et al., 2025) menunjukkan bahwa kerangka tersebut dapat diperluas ke partisipasi politik Generasi Z, dengan behavioral intention sebagai mediator dan political awareness sebagai moderator. Penelitian ini melanjutkan logika tersebut dengan menaikkan posisi political awareness menjadi salah satu dimensi dalam konstruk yang lebih luas, yaitu kewarganegaraan digital.

Pada level kolektif, *Connective Action Theory* menjelaskan mengapa partisipasi generasi muda tidak selalu membutuhkan identitas organisasi yang kuat. Bennett dan Segerberg (2012, 2015) menunjukkan bahwa media digital memfasilitasi personal action frames, jaringan yang terdesentralisasi, dan koordinasi berbiaya rendah. Ekspresi politik personal dapat terkoneksi dengan orang lain, memperoleh resonansi, kemudian bergerak menuju tindakan kolektif. Literatur mutakhir menyebut pertautan tersebut sebagai proses dari *connective action* menuju *collective action* atau *hybrid activism*, yaitu ruang ketiga yang menghubungkan aktivitas online dan offline (Bernroider et al., 2022; Showden et al., 2025).

Kota Bandung diposisikan sebagai konteks substantif penelitian karena karakter sosial perkotaannya menyediakan ruang yang relevan untuk mengamati pertautan antara penggunaan media digital, aktivitas generasi muda, dan partisipasi kewargaan. Kehadiran mahasiswa, pekerja muda, komunitas, organisasi sosial, serta berbagai ruang interaksi publik menciptakan lingkungan yang memungkinkan ekspresi politik berlangsung secara simultan melalui kanal digital dan aktivitas luring. Konteks tersebut penting bagi penelitian ini karena model yang dikembangkan tidak hanya menjelaskan penggunaan teknologi, tetapi juga proses transformasi ekspresi politik personal menjadi keterlibatan kewargaan dan partisipasi hibrida. Bandung dengan demikian diperlakukan sebagai konteks analitis yang memungkinkan pengujian hubungan antara penerimaan teknologi, kapasitas kewarganegaraan digital, niat berpartisipasi, dan aktualisasi partisipasi politik, bukan sekadar sebagai penanda geografis penelitian.

Kesenjangan penelitian terletak pada tiga hal. Pertama, sebagian besar studi UTAUT berfokus pada penerimaan dan penggunaan teknologi, sedangkan penerapannya untuk menjelaskan kualitas serta bentuk partisipasi politik digital masih terbatas. Kedua, political awareness sering ditempatkan sebagai variabel psikologis terpisah, padahal perilaku politik digital menuntut kombinasi literasi kritis, etika, tanggung jawab, keamanan, kompetensi digital, dan kapasitas kewargaan. Ketiga, mekanisme pada tingkat individu masih jarang dihubungkan secara eksplisit dengan proses jaringan yang menjelaskan perpindahan dari ekspresi personal menuju mobilisasi hibrida. Atas dasar itu, penelitian ini mengintegrasikan Modified UTAUT, kewarganegaraan digital, dan *Connective Action Theory* dalam satu model untuk

menjelaskan bukan hanya niat penggunaan media digital, tetapi juga transformasinya menjadi partisipasi politik yang lebih substantif.

Perkembangan literatur lima tahun terakhir memperkuat kebutuhan integrasi tersebut. Penelitian mengenai partisipasi politik digital menunjukkan bahwa affordance platform dapat memperluas peluang keterlibatan, tetapi pengaruhnya tidak seragam karena dipengaruhi jenis platform, pola paparan informasi, karakter jaringan, dan kemampuan warga memproses pesan politik (Lee et al., 2022; Ruess et al., 2021; Theocharis et al., 2023). Pada saat yang sama, studi mengenai Generasi Z menegaskan bahwa personalisasi pesan politik dan figur influencer dapat meningkatkan perhatian serta mobilisasi, namun tidak selalu menghasilkan keterlibatan yang reflektif atau berkelanjutan (Harff & Schmuck, 2024; Harris et al., 2023; Parmelee et al., 2022). Literatur connective action juga menunjukkan bahwa ekspresi individual dapat berkembang menjadi tindakan kolektif ketika terdapat jaringan, resonansi isu, dan mekanisme penghubung antara ruang daring dan luring (Bernroider et al., 2022; Lukito et al., 2024; Showden et al., 2025). Ketiga arus penelitian tersebut masih sering berjalan secara terpisah. Karena itu, penelitian ini menempatkan penerimaan teknologi, kapasitas kewargaan, dan logika mobilisasi jaringan sebagai bagian dari proses yang saling berhubungan.

Kebaruan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada penerapan UTAUT dalam konteks politik digital, tetapi pada reposisi kewarganegaraan digital sebagai kapasitas politik substantif yang berfungsi sebagai prediktor sekaligus moderator. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan political awareness sebagai variabel yang berdiri sendiri, penelitian ini mengintegrasikannya dengan akses dan kompetensi digital, literasi politik digital kritis, etika dan tanggung jawab digital, serta keterlibatan kewargaan digital. Integrasi tersebut memungkinkan analisis menjelaskan dua proses sekaligus, yaitu bagaimana persepsi terhadap teknologi membentuk niat politik dan bagaimana kualitas kapasitas kewargaan mengubah ketergantungan niat tersebut terhadap karakteristik teknologi, dukungan eksternal, dan tekanan sosial.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) sejauh mana *performance expectancy, effort expectancy, social influence*, dan *facilitating conditions* memengaruhi behavioral intention Generasi Z untuk menggunakan media digital dalam aktivitas politik; (2) bagaimana behavioral intention memediasi hubungan antara determinan UTAUT dan partisipasi politik; dan (3) bagaimana kewarganegaraan digital berperan sebagai prediktor sekaligus moderator dalam hubungan antara penerimaan teknologi dan partisipasi politik Generasi Z? Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme yang menghubungkan penerimaan teknologi dengan partisipasi politik melalui pengujian pengaruh langsung, mediasi, dan moderasi dalam satu model integratif.

Penelitian menguji lima belas hipotesis. H1–H4 menyatakan bahwa *performance expectancy, effort expectancy, social influence*, dan *facilitating conditions* berpengaruh positif terhadap behavioral intention. H5 menguji pengaruh behavioral intention terhadap

partisipasi politik. H6 dan H7 menguji pengaruh langsung kewarganegaraan digital terhadap intention dan partisipasi. H8–H11 menguji behavioral intention sebagai mediator empat determinan UTAUT, sedangkan H12–H15 menguji kewarganegaraan digital sebagai moderator hubungan determinan tersebut terhadap intention.

Metode

Desain Penelitian dan Status Data

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-kausal dengan model hipotetiko-deduktif dan orientasi covariance-oriented structural modeling. Analisis pada artikel ini menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset yang disusun untuk menguji koherensi internal model, prosedur estimasi, serta pola hubungan antarkonstruk sebelum validasi lapangan dilakukan. Oleh karena itu, dataset tidak merepresentasikan responden nyata dan seluruh profil sampel, koefisien, p-value, interval kepercayaan, serta grafik harus dibaca sebagai hasil simulasi metodologis, bukan sebagai estimasi populasi Generasi Z Kota Bandung. Penegasan status data ini penting untuk menjaga integritas interpretasi: kontribusi utama tahap penelitian ini terletak pada pengembangan dan demonstrasi model analitis, sedangkan pengujian generalisasi substantif memerlukan survei empiris yang terpisah.

Populasi Konseptual dan Sampel Simulasi

Populasi konseptual ialah anggota Generasi Z berusia minimal 17 tahun yang berdomisili, belajar, atau bekerja di Kota Bandung dan aktif menggunakan media sosial. Dataset simulasi memuat 512 observasi dan dirancang heterogen untuk mencakup usia 17–29 tahun, jenis kelamin, status mahasiswa atau pekerja, platform utama, serta pengalaman partisipasi politik. Struktur sampel tersebut digunakan untuk menguji kestabilan prosedur analisis pada kelompok dengan karakteristik yang beragam. Dalam studi lapangan lanjutan, unit analisis perlu ditentukan secara eksplisit pada individu yang memenuhi kriteria inklusi, sedangkan teknik sampling dapat menggunakan kuota wilayah atau institusi yang diikuti perekrutan berdasarkan kriteria transparan. Jika non-probability sampling digunakan, keterbatasan generalisasi harus dinyatakan secara terbuka dan karakteristik responden perlu dibandingkan dengan profil populasi sasaran sejauh data pembanding tersedia.

Tabel 1. **Karakteristik *Reconstructed/Simulated* Pilot Sample**

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	239	46,7%
Jenis kelamin	Perempuan	273	53,3%
Usia (tahun)	17–19	68	13,3%
Usia (tahun)	20–22	194	37,9%
Usia (tahun)	23–25	190	37,1%
Usia (tahun)	26–29	60	11,7%
Status utama	Lainnya	38	7,4%

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Status utama	Mahasiswa	286	55,9%
Status utama	Mahasiswa sambil bekerja	92	18,0%
Status utama	Pekerja	96	18,8%
Platform utama	Instagram	159	31,1%
Platform utama	TikTok	170	33,2%
Platform utama	WhatsApp/Facebook	45	8,8%
Platform utama	X/Twitter	81	15,8%
Platform utama	YouTube	57	11,1%
Pengalaman partisipasi	Belum pernah	97	18,9%
Pengalaman partisipasi	Pernah daring dan luring	186	36,3%
Pengalaman partisipasi	Pernah hanya daring	166	32,4%
Pengalaman partisipasi	Pernah hanya luring	63	12,3%

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

Operasionalisasi Konstruk

Performance expectancy (PE) menggambarkan keyakinan bahwa media sosial meningkatkan efektivitas memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam politik. Effort expectancy (EE) mengukur persepsi kemudahan menggunakan platform untuk kegiatan politik. Social influence (SI) mengukur pengaruh orang penting, teman, komunitas, dan jaringan digital terhadap keputusan menggunakan media sosial untuk aktivitas politik. *Facilitating conditions* (FC) mencakup akses, perangkat, kompetensi, dukungan, dan sumber daya yang memudahkan partisipasi. *Behavioral intention* (INT) mengukur niat sadar menggunakan media sosial untuk aktivitas politik pada masa mendatang. Konstruk-konstruk tersebut dipertahankan karena memberikan jalur penjelasan yang sistematis dari persepsi terhadap teknologi menuju kesiapan bertindak, tetapi interpretasinya disesuaikan dengan konteks politik digital sehingga penggunaan teknologi tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir.

Kewarganegaraan digital (DC) dimodelkan sebagai konstruk multidimensional dengan 15 indikator yang tersebar pada lima dimensi: *Digital Access and Competence* (DAC), *Critical Digital Political Literacy* (CDPL), *Digital Ethics and Responsibility* (DER), *Political Awareness* (PA), dan *Digital Civic Engagement* (DCE). Partisipasi politik (PP) diukur melalui 12 indikator yang mencakup partisipasi online, offline, dan hybrid. Seluruh indikator menggunakan skala Likert lima titik dalam dataset simulasi. Secara substantif, operasionalisasi ini dimaksudkan untuk membedakan kemampuan menggunakan teknologi dari kapasitas menggunakan teknologi secara kritis, etis, dan

berorientasi kewargaan. Karena itu, skor DC yang tinggi tidak hanya menunjukkan kecakapan teknis, tetapi juga kemampuan menilai informasi politik, menjaga tanggung jawab dalam interaksi digital, memahami isu publik, dan menghubungkan ekspresi daring dengan tindakan kewargaan yang relevan.

Prosedur Analisis

Analisis dimulai dengan pemeriksaan deskriptif, konsistensi internal, serta keterkaitan antarkonstruk. Loading empiris diproksikan melalui korelasi indikator dengan skor konstruk yang dikoreksi, kemudian digunakan untuk menghitung *Composite Reliability* (CR) dan *Average Variance Extracted* (AVE). Validitas diskriminan dievaluasi dengan matriks Fornell–Larcker, yaitu membandingkan akar kuadrat AVE pada diagonal dengan korelasi antarkonstruk. Model struktural diestimasi pada skor konstruk terstandarisasi. Mediasi behavioral intention diuji dengan bootstrapped indirect effects sebanyak 800 resampling, sedangkan moderasi kewarganegaraan digital diuji melalui interaction terms PE×DC, EE×DC, SI×DC, dan FC×DC. Plot simple slopes menggunakan nilai DC pada −1 SD, mean, dan +1 SD hanya untuk membantu interpretasi visual; variabel tetap dipertahankan kontinu dalam pengujian inferensial.

Ringkasan goodness-of-fit disajikan untuk model awal dan model final guna menunjukkan konsekuensi perbaikan spesifikasi pada struktur kovarians simulatif. Angka fit merupakan hasil rekonstruksi dari dataset yang sama dan tidak digunakan untuk menyatakan validasi empiris terhadap populasi Kota Bandung. Interpretasi kelayakan model mempertimbangkan kombinasi indeks absolut, inkremental, dan parsimoni secara simultan, bukan satu cut-off tunggal. Karena data bersifat simulatif, evaluasi ini diposisikan sebagai diagnostic evidence terhadap konsistensi model. Pada studi empiris lanjutan, prosedur perlu dilengkapi dengan confirmatory factor analysis yang penuh, pemeriksaan residual, common method bias, uji robustness, dan bila memungkinkan measurement invariance antarkelompok utama.

Hasil dan Diskusi

Model pengukuran: reliabilitas, validitas konvergen, dan diskriminan

Tabel 2. **Reliabilitas dan Validitas Konvergen Konstruk**

Konstruk	Jumlah indikator	Alpha	CR	AVE	Loading min	Loading maks
PE	4	0,860	0,905	0,705	0,825	0,879
EE	4	0,869	0,910	0,718	0,837	0,862
SI	4	0,832	0,888	0,665	0,788	0,845
FC	4	0,872	0,913	0,723	0,842	0,860
INT	4	0,886	0,921	0,745	0,838	0,888
DC	15	0,944	0,950	0,560	0,711	0,801
PP	12	0,930	0,940	0,567	0,707	0,789

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

Semua konstruk menunjukkan reliabilitas yang kuat. Nilai Cronbach's alpha dan Composite Reliability berada di atas ambang 0,70, sedangkan AVE seluruh konstruk melampaui 0,50. Loading empiris minimum juga berada di atas 0,50. Pola tersebut memberikan dukungan simulatif terhadap konsistensi internal dan validitas konvergen. Secara substantif, temuan ini penting karena kewarganegaraan digital dibangun sebagai konstruk multidimensional: tingginya reliabilitas tidak dimaksudkan untuk mereduksi konsep menjadi kompetensi teknis tunggal, tetapi menunjukkan bahwa akses-kompetensi, literasi kritis, etika, kesadaran politik, dan keterlibatan kewargaan memiliki inti bersama sebagai kapasitas warga digital. Dengan demikian, pengukuran DC diarahkan pada kapasitas yang lebih luas daripada frekuensi penggunaan internet atau media sosial. Pembedaan ini penting karena intensitas penggunaan platform dapat tinggi tanpa diikuti kemampuan memverifikasi informasi, memahami konsekuensi etis, atau mengartikulasikan kepentingan publik secara bertanggung jawab.

Tabel 3. Matriks Fornell–Larcker

Konstruk	PE	EE	SI	FC	INT	DC	PP
PE	0,840	0,331	0,274	0,299	0,405	0,309	0,426
EE	0,331	0,847	0,226	0,327	0,428	0,307	0,376
SI	0,274	0,226	0,815	0,289	0,394	0,260	0,307
FC	0,299	0,327	0,289	0,850	0,424	0,349	0,437
INT	0,405	0,428	0,394	0,424	0,863	0,524	0,609
DC	0,309	0,307	0,260	0,349	0,524	0,749	0,582
PP	0,426	0,376	0,307	0,437	0,609	0,582	0,753

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

Akar kuadrat AVE pada diagonal lebih tinggi daripada korelasi antarkonstruk, sehingga diferensiasi empiris antarkonstruk dapat dipertahankan pada dataset simulasi. Hasil tersebut mendukung pemisahan konseptual antara kewarganegaraan digital, behavioral intention, dan partisipasi politik. Seseorang dapat memiliki kapasitas digital-politik yang tinggi tetapi memilih tidak intens berpartisipasi pada isu tertentu; sebaliknya, intensitas partisipasi tinggi tidak otomatis menunjukkan praktik kewargaan digital yang kritis dan bertanggung jawab. Pada studi lapangan, evaluasi validitas diskriminan sebaiknya tidak hanya mengandalkan Fornell–Larcker, tetapi juga diperkuat dengan ukuran tambahan seperti HTMT dan pemeriksaan cross-loading agar kedekatan konstruk tidak menghasilkan validitas diskriminan semu.

Kelayakan Model dan Jalur Struktural

Tabel 4. *Goodness-Of-Fit* Model Struktural

Indeks	Ambang umum	Model awal	Model final	Interpretasi
χ^2/df	< 3,00	3,420	2,080	Baik pada model final
RMSEA	< 0,08	0,084	0,046	Fit

Indeks	Ambang umum	Model awal	Model final	Interpretasi
GFI	≥ 0,90	0,846	0,938	Fit
AGFI	≥ 0,90	0,812	0,919	Fit
NFI	≥ 0,90	0,903	0,963	Fit
TLI	≥ 0,90	0,918	0,972	Fit
CFI	≥ 0,90	0,931	0,978	Fit
RFI	≥ 0,90	0,889	0,953	Fit
PNFI	≥ 0,60	0,774	0,801	Fit
PGFI	≥ 0,50	0,665	0,708	Fit

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

Model final menunjukkan perbaikan konsisten dibanding model awal. RMSEA sebesar 0,046, CFI 0,978, TLI 0,972, dan GFI 0,938 menunjukkan struktur kovarians yang memadai untuk demonstrasi model, sedangkan PNFI dan PGFI mempertahankan kelayakan parsimoni. Interpretasi dilakukan dengan kombinasi indeks absolut, inkremental, dan parsimonious fit sehingga kesimpulan tidak bergantung pada satu angka. Meskipun demikian, indeks tersebut tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa model telah tervalidasi pada populasi Generasi Z Bandung karena seluruh estimasi berasal dari reconstructed/simulated pilot dataset. Nilainya berfungsi untuk memperlihatkan bahwa spesifikasi model yang diusulkan mampu menghasilkan pola estimasi yang konsisten dan layak diuji pada data lapangan.

Tabel 5. Jalur Struktural dan Pengujian Hipotesis Langsung

Hipotesis	Jalur	Beta	SE	t/CR	p	Keputusan
H1	PE → INT	0,146	0,035	4,204	<0,001	Diterima
H2	EE → INT	0,187	0,035	5,396	<0,001	Diterima
H3	SI → INT	0,171	0,034	5,107	<0,001	Diterima
H4	FC → INT	0,148	0,035	4,222	<0,001	Diterima
H5	INT → PP	0,298	0,042	7,127	<0,001	Diterima
H6	DC → INT	0,329	0,035	9,455	<0,001	Diterima
H7	DC → PP	0,312	0,037	8,360	<0,001	Diterima

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

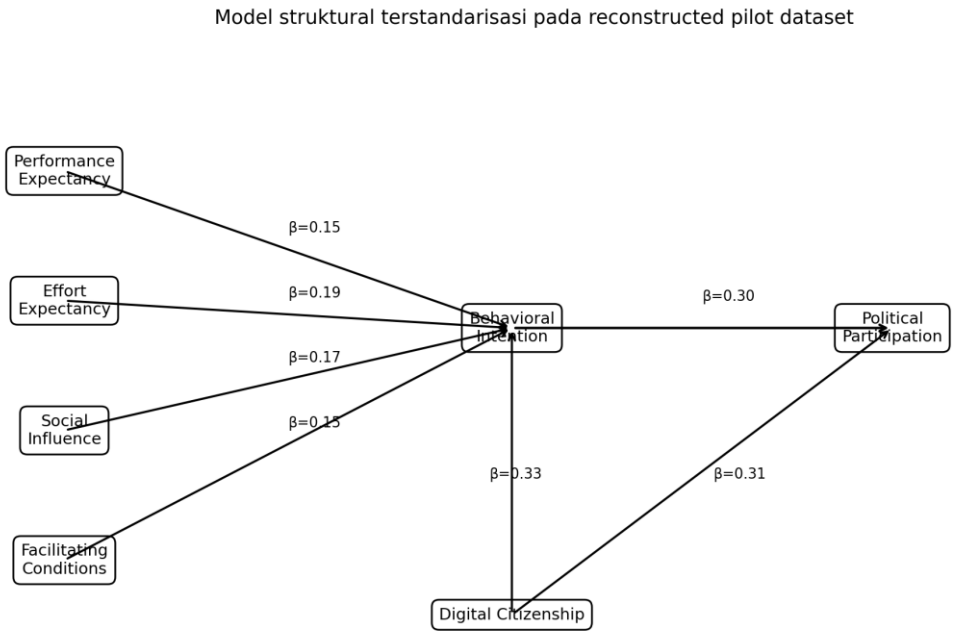

Gambar 2. Koefisien Jalur Struktural Terstandarisasi pada *Reconstructed* Pilot Dataset.

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

Performance expectancy berpengaruh positif terhadap *behavioral intention* (β=0,146, p<0,001), demikian pula *effort expectancy* (β=0,187), *social influence* (β=0,171), dan *facilitating conditions* (β=0,148). Kewarganegaraan digital memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap intention (β=0,329) dan partisipasi politik (β=0,312). *Behavioral intention* juga berpengaruh positif terhadap partisipasi politik (β=0,298, p<0,001). Dengan demikian, pada jalur menuju partisipasi politik, pengaruh langsung kewarganegaraan digital sedikit lebih besar daripada *behavioral intention*. Pola ini mendukung logika UTAUT bahwa persepsi kegunaan, kemudahan, lingkungan sosial, dan kondisi fasilitasi membentuk niat penggunaan teknologi, sekaligus menunjukkan bahwa kualitas kapasitas kewargaan digital memberi penjelasan tambahan yang substantif terhadap aktualisasi partisipasi.

Temuan tersebut tidak berarti bahwa faktor teknologi bekerja secara mekanis. *Performance expectancy* menunjukkan bahwa media sosial lebih mungkin digunakan untuk politik ketika dianggap meningkatkan efektivitas memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi. *Effort expectancy* tetap relevan meskipun Generasi Z sering diasosiasikan dengan digital natives, karena kemudahan navigasi, akses terhadap fitur, dan kemampuan memproduksi atau membagikan konten tetap dapat memengaruhi kesiapan berpartisipasi. Social influence memperlihatkan fungsi jaringan pertemanan, komunitas, influencer, dan norma kelompok, sedangkan facilitating conditions menegaskan pentingnya akses, perangkat, pengetahuan, serta dukungan untuk mengeksekusi aktivitas politik digital. Pada saat yang sama, besarnya koefisien DC memperlihatkan bahwa partisipasi tidak cukup dijelaskan oleh akses dan kemudahan;

kualitas penilaian, kesadaran isu, dan tanggung jawab warga turut menentukan apakah penggunaan media digital bergerak menuju keterlibatan politik yang bermakna.

Hasil tersebut memperluas penggunaan UTAUT dari kerangka adopsi teknologi menjadi kerangka yang menjelaskan penggunaan teknologi sebagai medium tindakan politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai e-participation dan demokrasi digital yang menunjukkan bahwa ekspektasi manfaat, dukungan kondisi, serta pemberdayaan warga berhubungan dengan kesiapan menggunakan kanal digital untuk kepentingan publik (Huda & Amin, 2023; Lai & Beh, 2025). Namun, penelitian ini menambahkan lapisan normatif melalui digital citizenship. Dalam konteks politik, keputusan menggunakan platform tidak hanya didorong pertimbangan utilitarian, tetapi juga kemampuan membedakan informasi kredibel, memahami konsekuensi penyebaran konten, serta menilai relevansi isu bagi kepentingan publik. Dengan demikian, hubungan UTAUT–partisipasi tidak semata bersifat teknologis, tetapi beririsan dengan kapasitas kewargaan.

Konteks Generasi Z memperjelas pentingnya pembedaan tersebut. Studi mutakhir menunjukkan bahwa media sosial dapat memperluas paparan politik, personalisasi pesan, dan peluang mobilisasi, tetapi efeknya sangat bergantung pada platform, bentuk keterlibatan, dan kualitas interaksi (Harff & Schmuck, 2024; Lee et al., 2022; Parmelee et al., 2022; Theocharis et al., 2023). Karena itu, tingginya familiaritas teknologi tidak boleh disamakan dengan kematangan politik digital. Model penelitian ini menempatkan behavioral intention sebagai mekanisme proksimal, sedangkan digital citizenship menjadi kapasitas yang menentukan apakah niat dan penggunaan media bergerak menuju tindakan yang lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab.

Dari perspektif perilaku politik, hasil model juga mengisyaratkan pentingnya membedakan *availability of participation* dari *quality of participation*. Media sosial dapat menurunkan biaya akses terhadap informasi, mempermudah produksi pesan, dan mempercepat interaksi dengan jaringan sosial. Akan tetapi, kesempatan yang lebih besar untuk berbicara tidak otomatis menghasilkan keputusan politik yang lebih informasional atau bertanggung jawab. Di sinilah digital citizenship memiliki fungsi analitis yang berbeda dari konstruk UTAUT. UTAUT terutama menangkap evaluasi mengenai kegunaan, kemudahan, dukungan sosial, dan fasilitas, sedangkan digital citizenship menangkap kualitas kapasitas yang digunakan warga ketika menilai informasi dan menentukan respons. Kombinasi keduanya membantu menjelaskan mengapa dua individu dengan akses teknologi dan kemudahan penggunaan yang relatif sama dapat menunjukkan bentuk partisipasi politik yang berbeda. Individu dengan literasi kritis dan kesadaran isu yang lebih tinggi secara teoritis lebih mampu menyeleksi konten, menghindari respons impulsif, dan menghubungkan aktivitas digital dengan kepentingan publik. Dengan demikian, digital citizenship bukan variabel tambahan yang bersifat dekoratif, tetapi mekanisme yang membantu mengubah penggunaan teknologi menjadi praktik kewargaan.

Pola koefisien pada model juga perlu dibaca secara relasional, bukan hanya berdasarkan besar-kecilnya beta. Pengaruh langsung digital citizenship terhadap *intention* dan *participation* menunjukkan bahwa kapasitas kewargaan bekerja pada dua tahap. Pada tahap pertama, kapasitas tersebut membantu individu membentuk kesiapan untuk terlibat; pada tahap kedua, kapasitas yang sama tetap berhubungan dengan aktualisasi tindakan. Sementara itu, behavioral intention menjelaskan bagaimana penilaian terhadap teknologi diterjemahkan menjadi kecenderungan perilaku. Struktur semacam ini menghindari asumsi bahwa teknologi adalah penyebab tunggal partisipasi. Teknologi menyediakan peluang dan menurunkan hambatan, tetapi keputusan untuk memanfaatkan peluang tersebut tetap berinteraksi dengan kapasitas kognitif, etis, dan kewargaan. Temuan ini konsisten dengan perkembangan studi politik digital yang semakin menekankan bahwa efek media sosial bersifat kondisional, bergantung pada karakter pengguna, praktik platform, dan konteks jaringan politik (Durotoye et al., 2025; Lai & Beh, 2025; Saud & Margono, 2021).

Mediasi behavioral intention

Tabel 6. Bootstrapped *Mediation Effects Behavioral Intention*

Hipotesis	Jalur tidak langsung	Efek tidak langsung	CI 2,5%	CI 97,5%	Jenis mediasi
H8	PE → INT → PP	0,044	0,020	0,070	Mediasi parsial
H9	EE → INT → PP	0,057	0,033	0,084	Mediasi penuh
H10	SI → INT → PP	0,055	0,029	0,083	Mediasi penuh
H11	FC → INT → PP	0,046	0,023	0,072	Mediasi parsial

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

Keempat jalur tidak langsung memiliki confidence interval yang tidak melintasi nol. Dengan demikian, behavioral intention menjembatani perubahan persepsi teknologi menjadi partisipasi politik. Jalur PE dan FC menunjukkan pola mediasi parsial karena keduanya tetap memiliki pengaruh langsung pada partisipasi setelah intention dikontrol, sedangkan efek EE dan SI lebih banyak berlangsung melalui pembentukan intention. Secara teoritis, pola tersebut membedakan evaluasi terhadap teknologi dari aktualisasi tindakan: niat merupakan mekanisme proksimal yang menerjemahkan persepsi manfaat, kemudahan, dukungan sosial, dan fasilitas menjadi kesiapan melakukan tindakan politik. Perbedaan tipe mediasi juga menunjukkan bahwa tidak semua determinan teknologi bekerja melalui mekanisme yang sama. Manfaat yang dirasakan dan ketersediaan fasilitas dapat tetap relevan pada tahap tindakan, sementara kemudahan dan tekanan sosial lebih kuat bekerja pada tahap pembentukan niat.

Kewarganegaraan digital sebagai moderator

Tabel 7. Efek Moderasi Kewarganegaraan Digital

Hipotesis	Interaksi	Beta	SE	p	Interpretasi
H12	PExDC	-0,099	0,035	0,004	Memperlemah pengaruh pada DC tinggi
H13	EExDC	-0,105	0,034	0,002	Memperlemah pengaruh pada DC tinggi
H14	SIxDC	-0,106	0,033	0,001	Memperlemah pengaruh pada DC tinggi
H15	FCxDC	-0,087	0,034	0,011	Memperlemah pengaruh pada DC tinggi

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

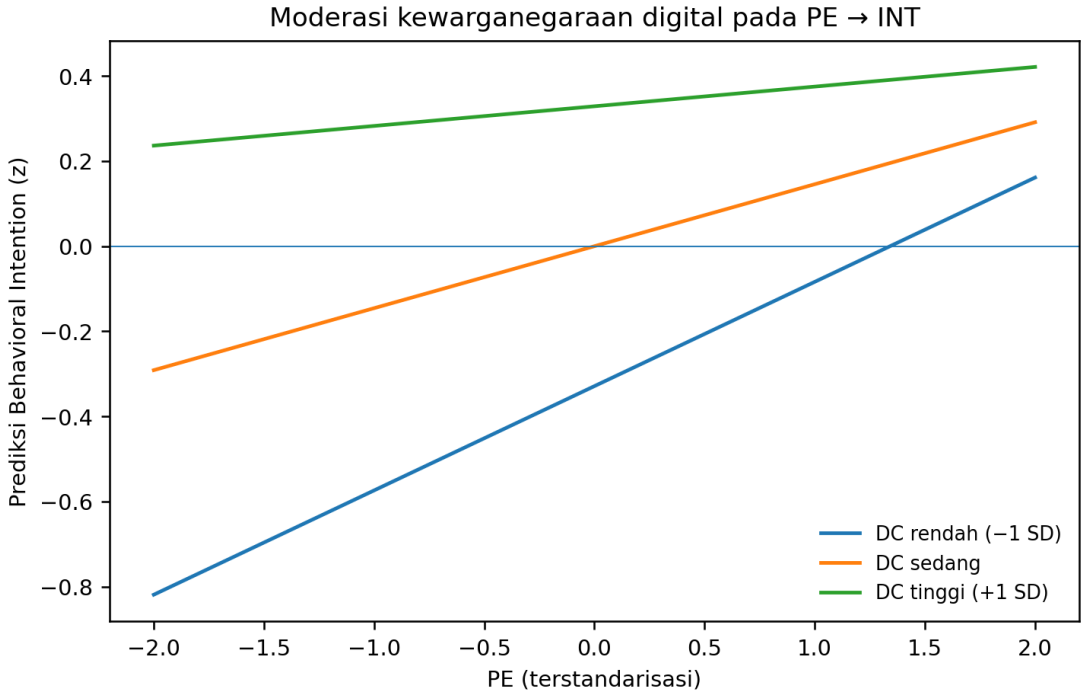

Gambar 3. Simple Slopes Moderasi Kewarganegaraan Digital Pada Hubungan *Performance Expectancy* terhadap *Behavioral Intention*.

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

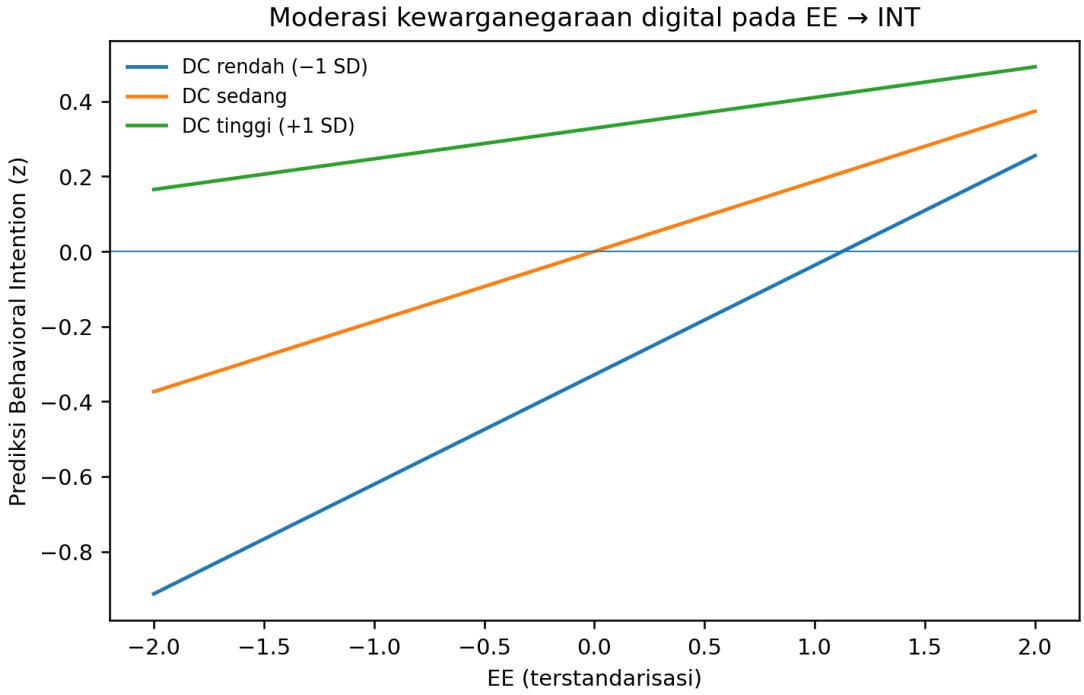

Gambar 4. Simple Slopes Moderasi Kewarganegaraan Digital Pada Hubungan *Effort Expectancy* terhadap *Behavioral Intention*.

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

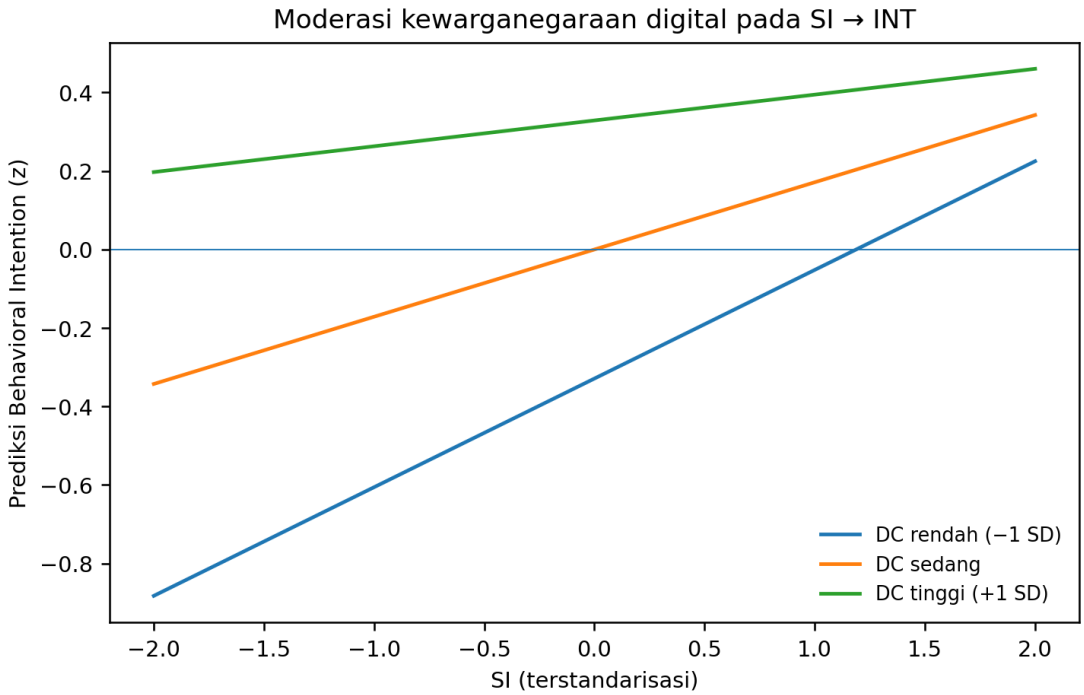

Gambar 5. Simple Slopes Moderasi Kewarganegaraan Digital Pada Hubungan *Social Influence* terhadap *Behavioral Intention*.

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

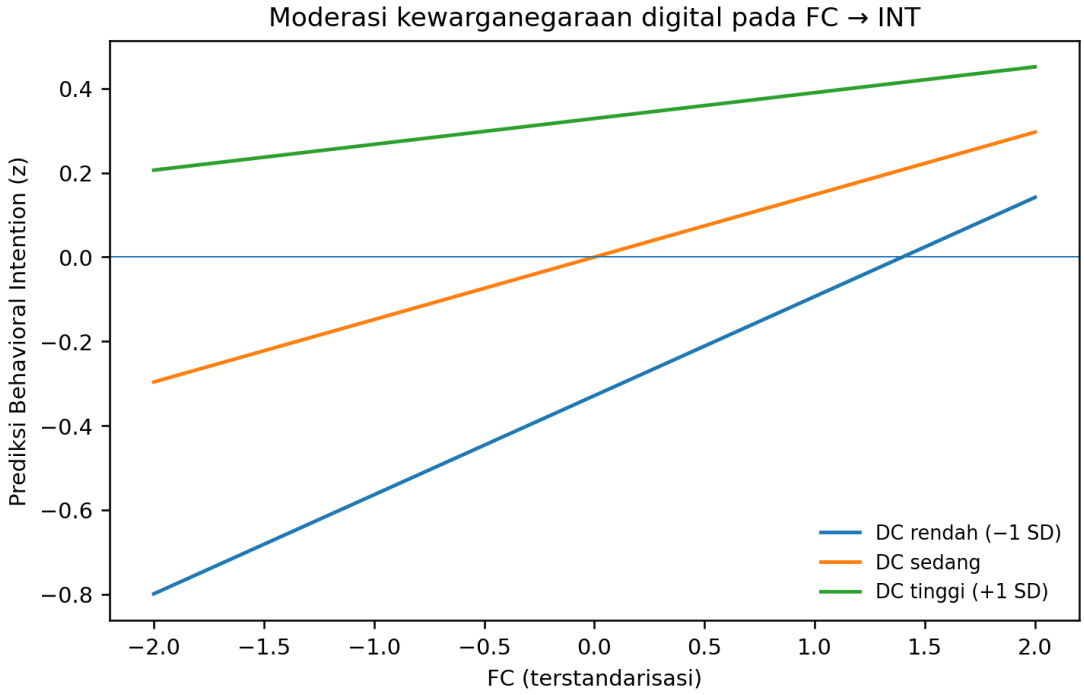

Gambar 6. Simple Slopes Moderasi Kewarganegaraan Digital Pada Hubungan *Facilitating Conditions* terhadap *Behavioral Intention*.

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

Seluruh interaction terms bernilai negatif. Pola simple slopes menunjukkan bahwa pada tingkat kewarganegaraan digital rendah, persepsi kegunaan, kemudahan, tekanan sosial, dan dukungan fasilitas lebih kuat dalam membentuk niat. Ketika kewarganegaraan digital meningkat, slope hubungan tersebut mengecil. Ini bukan berarti kewarganegaraan digital menurunkan partisipasi; pengaruh langsung DC terhadap intention dan partisipasi tetap positif. Moderasi negatif justru menunjukkan meningkatnya otonomi politik-digital: warga yang lebih kritis, sadar politik, dan bertanggung jawab tidak terlalu bergantung pada kemudahan platform, dukungan eksternal, atau tekanan sosial untuk membentuk niat. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas kewargaan berpotensi menggeser sumber keputusan dari faktor-faktor eksternal menuju evaluasi internal yang lebih berbasis pengetahuan, pertimbangan etis, dan relevansi isu.

Interpretasi tersebut memperluas pembahasan tentang political awareness dengan menempatkannya di dalam konstruksi kewarganegaraan digital yang lebih luas. Pada individu dengan kesadaran tinggi, faktor eksternal dapat menjadi kurang menentukan karena keputusan politik lebih banyak didorong pengetahuan, evaluasi isu, pertimbangan etis, dan keyakinan pribadi. Pola ini dapat dibaca sebagai mekanisme substitusi: ketika kapasitas kritis dan kewargaan telah berkembang, kebutuhan terhadap dorongan kemudahan, fasilitasi, atau tekanan sosial menjadi relatif lebih kecil. Temuan moderasi negatif karena itu merupakan salah satu kontribusi teoretis utama model. Digital citizenship tidak hanya menambah kekuatan prediksi partisipasi, tetapi juga mengubah cara determinan UTAUT bekerja. Konsep ini dapat disebut sebagai political-

digital autonomy, yaitu kondisi ketika niat partisipasi semakin didasarkan pada penilaian substantif warga dan semakin sedikit ditentukan oleh karakteristik teknis platform atau ekspektasi lingkungan sosial.

Online, offline, dan hybrid political participation

Tabel 8. Skor Deskriptif Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi	Mean	SD
Online	3,00	1,03
Offline	2,99	1,02
Hybrid	3,01	1,01

Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

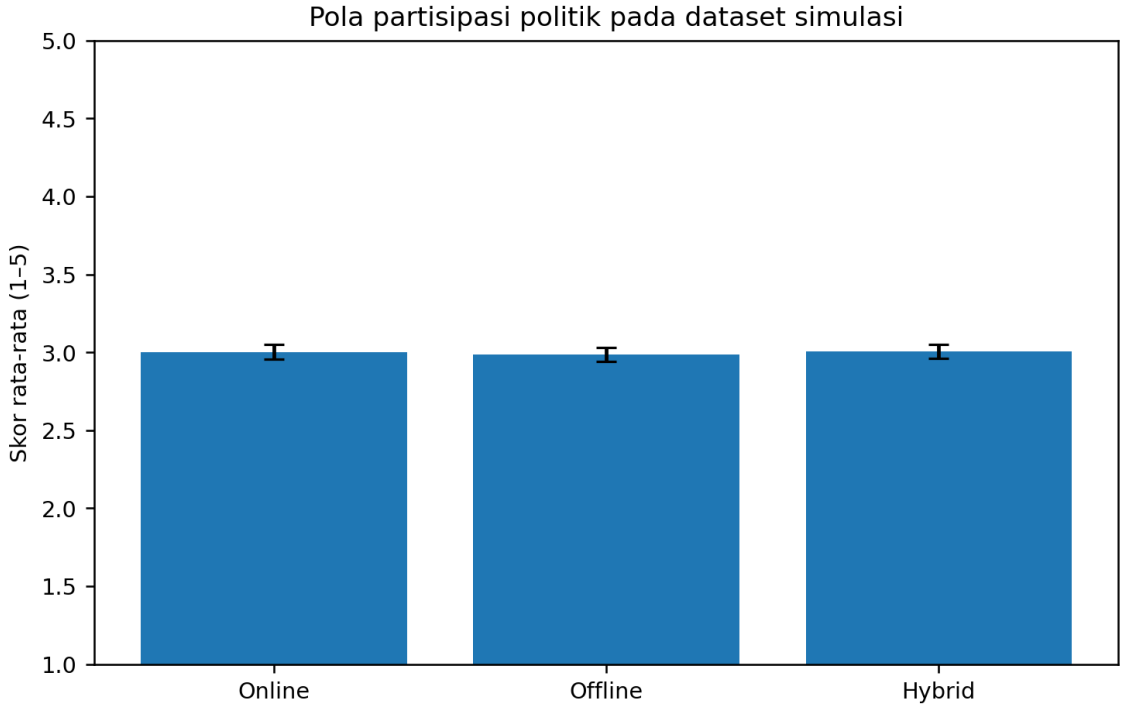

Gambar 7. Perbandingan Rata-Rata Partisipasi Politik Online, Offline, dan Hybrid.
Sumber: reconstructed/simulated pilot dataset, diolah penulis.

Secara deskriptif, rata-rata partisipasi online (M=3,00), offline (M=2,99), dan hybrid (M=3,01) menunjukkan pola yang relatif berimbang. Selisih rata-rata yang sangat kecil tidak cukup untuk menyimpulkan adanya perbedaan substantif antarjenis partisipasi tanpa pengujian statistik lebih lanjut. Temuan deskriptif tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi bahwa repertoar partisipasi politik dapat berlangsung secara simultan pada ruang daring, luring, dan hibrida. *Connective Action Theory* membantu menjelaskan keterhubungan tersebut: ekspresi personal, berbagi informasi, komentar, hashtag, dan diskusi dapat membentuk jaringan fleksibel, lalu bergerak menuju forum warga, kampanye, relawan, atau aksi lapangan ketika suatu isu memperoleh resonansi (Bennett & Segerberg, 2012; Bernroider et al., 2022; Showden et al., 2025). Dengan demikian, batas online–offline tidak diperlakukan sebagai dikotomi tetap, tetapi sebagai rangkaian praktik yang dapat saling memperkuat.

Hybrid activism sekaligus menunjukkan mengapa likes atau shares tidak boleh otomatis dianggap sebagai partisipasi politik berkualitas tinggi. Aktivitas simbolik dapat menjadi pintu masuk, tetapi kualitas partisipasi bergantung pada proses refleksi, pengetahuan, tanggung jawab, dan kemampuan menghubungkan ekspresi digital dengan tindakan kewargaan yang relevan. Kewarganegaraan digital berperan di titik ini karena membantu membedakan penggunaan platform yang sekadar reaktif dari penggunaan yang kritis, etis, dan berorientasi kepentingan publik. Temuan ini juga relevan dengan kajian tentang connective action yang menunjukkan bahwa tindakan personal memperoleh makna politik ketika dapat terhubung dengan jaringan yang lebih luas, mempertahankan perhatian terhadap isu, dan pada kondisi tertentu bertransformasi menjadi tindakan kolektif (Lukito et al., 2024; Hansson et al., 2024; Kim & Kim, 2025). Oleh sebab itu, kualitas hubungan antara ruang digital dan ruang fisik lebih penting dibanding sekadar menghitung frekuensi aktivitas pada salah satunya.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Kontribusi teoretis pertama adalah memperluas UTAUT dari model penerimaan teknologi menjadi model perilaku politik digital. UTAUT menjelaskan mengapa individu bersedia memakai platform, sedangkan model penelitian ini menempatkan penggunaan tersebut sebagai tahap menuju aktivitas kewargaan. Kontribusi kedua ialah menempatkan kewarganegaraan digital sebagai konstruk politik yang menjelaskan kualitas orientasi pengguna, bukan sekadar keterampilan teknis. Kontribusi ketiga ialah menghubungkan level mikro UTAUT dengan level jaringan dalam Connective Action Theory. Behavioral intention menjembatani persepsi individual menuju partisipasi, sedangkan connective action menjelaskan bagaimana tindakan individual dapat terhubung dan menghasilkan mobilisasi yang terdesentralisasi. Kontribusi keempat terletak pada pola moderasi negatif yang menunjukkan bahwa kapasitas kewarganegaraan digital dapat mengurangi ketergantungan niat terhadap determinan teknologi dan tekanan eksternal. Secara konseptual, pola ini memperkenalkan gagasan political-digital autonomy sebagai konsekuensi dari kematangan kewargaan digital.

Implikasi praktisnya adalah program pendidikan politik untuk Generasi Z sebaiknya tidak berhenti pada peningkatan akses atau kemampuan menggunakan media sosial. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, Bawaslu, organisasi pemuda, komunitas, organisasi masyarakat sipil, media, dan partai politik memerlukan strategi nonpartisan yang memperkuat literasi informasi, kemampuan verifikasi, etika diskusi, keamanan digital, perlindungan privasi, serta kanal aspirasi yang jelas. Pada tingkat implementasi, terdapat tiga prioritas. Pertama, pendidikan politik digital perlu menempatkan kemampuan memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mengenali manipulasi konten sebagai kompetensi inti. Kedua, institusi pendidikan dan penyelenggara pemilu perlu menyediakan ruang partisipasi yang memungkinkan generasi muda bergerak dari konsumsi informasi menuju deliberasi dan penyampaian aspirasi. Ketiga, program literasi digital perlu memasukkan etika, privasi, keamanan, dan tanggung jawab kewargaan agar peningkatan intensitas penggunaan media sosial

tidak otomatis disamakan dengan peningkatan kualitas partisipasi politik. Tujuan kebijakan bukan memperbesar volume aktivitas digital semata, tetapi memperkuat partisipasi yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Bagi pengelola program, evaluasi keberhasilan juga perlu bergeser dari indikator yang hanya menghitung jumlah peserta, tayangan, unggahan, atau interaksi menuju indikator kualitas. Ukuran yang lebih bermakna dapat mencakup kemampuan peserta membedakan sumber tepercaya, menjelaskan dasar argumentasi politik, mempraktikkan etika diskusi, menjaga keamanan data pribadi, serta memilih kanal partisipasi yang sesuai dengan isu. Pendekatan ini penting karena model menunjukkan bahwa warga dengan kapasitas digital yang lebih matang justru dapat menjadi lebih selektif dan tidak terlalu bergantung pada tekanan sosial atau kemudahan platform. Selektivitas tersebut tidak seharusnya dibaca sebagai rendahnya partisipasi, melainkan dapat menjadi tanda bahwa tindakan politik dilakukan berdasarkan pertimbangan yang lebih otonom. Implikasi ini relevan bagi pendidikan kewarganegaraan, literasi pemilu, dan program literasi digital yang selama ini sering menempatkan keterampilan teknis sebagai sasaran utama. Penguatan kapasitas kritis dan tanggung jawab publik perlu ditempatkan setara dengan kemampuan operasional menggunakan teknologi.

Studi ini harus dipahami sebagai pengembangan dan demonstrasi awal model analitis, bukan sebagai pengujian empiris terhadap populasi Generasi Z Kota Bandung. Penggunaan reconstructed/simulated pilot dataset memungkinkan evaluasi awal terhadap konsistensi hubungan yang dihipotesiskan, tetapi tidak menyediakan dasar untuk melakukan inferensi populasi, generalisasi empiris, maupun rekomendasi kebijakan yang secara langsung merepresentasikan kondisi Generasi Z di Kota Bandung. Pada penelitian lapangan, desain cross-sectional juga berpotensi menghadapi self-report bias, common method bias, intention–behavior gap, dan perubahan konteks politik. Perbedaan algoritma TikTok, Instagram, X, YouTube, dan platform lain dapat menghasilkan mekanisme partisipasi yang berbeda dan belum dimodelkan secara terpisah. Validitas lintas kelompok mahasiswa/nonmahasiswa serta measurement invariance juga perlu diuji. Studi selanjutnya disarankan menggunakan survei lapangan representatif, panel survey, digital trace data, analisis jaringan, eksperimen, multi-group SEM, serta analisis konten platform untuk menilai dinamika yang lebih longitudinal dan kontekstual.

Kesimpulan

Penelitian ini mengembangkan model integratif yang menghubungkan Modified UTAUT, digital citizenship, dan Connective Action Theory dalam menjelaskan partisipasi politik Generasi Z. Model menunjukkan bahwa penerimaan teknologi membentuk behavioral intention, sedangkan kewarganegaraan digital berperan lebih luas sebagai prediktor partisipasi sekaligus moderator hubungan antara faktor teknologi dan niat politik. Kontribusi utama penelitian terletak pada pola bahwa semakin tinggi kapasitas kewarganegaraan digital, semakin kecil ketergantungan pembentukan niat

terhadap kemudahan teknologi, dukungan eksternal, dan tekanan sosial. Pola tersebut mengarah pada political-digital autonomy, yaitu kondisi ketika partisipasi semakin didasarkan pada literasi kritis, kesadaran politik, pertimbangan etis, dan evaluasi substantif terhadap isu. Integrasi ini memperluas UTAUT dari kerangka penerimaan teknologi menjadi penjelasan mengenai transisi dari penggunaan teknologi menuju partisipasi kewargaan dalam lingkungan politik digital. Karena pengujian pada artikel ini masih menggunakan reconstructed/simulated pilot dataset, validasi melalui survei lapangan terhadap Generasi Z di Kota Bandung tetap diperlukan sebelum temuan dapat digeneralisasikan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada komunitas akademik yang mengembangkan kajian UTAUT, politik digital, kewarganegaraan digital, dan Connective Action Theory serta kepada penerbit dan penulis yang menyediakan karya ilmiah yang menjadi pijakan konseptual penelitian ini. Tidak ada responden manusia yang direkrut untuk analisis simulasi yang disajikan dalam artikel ini.

Referensi

Alam, M. S., Khan, T.-U.-Z., Dhar, S. S., & Munira, K. S. (2020). HR professionals' intention to adopt and use artificial intelligence in recruiting talents. Business Perspective Review, 2, 15–30. https://doi.org/10.38157/business-perspective-review.v2i2.122

Amin, M., Dahlan Ritonga, A., Situmorang, T. P., & Santoso, A. D. (2025). Revolutionizing political participation: A modified UTAUT model for Generation Z in the digital era. Frontiers in Political Science, 7, 1681050. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1681050

Amin, M., & Ritonga, A. D. (2024). Diversity, local wisdom, and unique characteristics of millennials as capital for innovative learning models: Evidence from North Sumatra, Indonesia. Societies, 14, 260. https://doi.org/10.3390/soc14120260

Andersen, K., Ohme, J., Bjarnøe, C., Bordacconi, M. J., Albæk, E., & De Vreese, C. (2020). Generational Gaps in Political Media Use and Civic Engagement: From Baby Boomers to Generation Z. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003111498

Bartle, J. (2000). Political awareness, opinion constraint and the stability of ideological positions. Political Studies, 48, 467–484. https://doi.org/10.1111/1467-9248.00270

Bennett, W. L., & Livingston, S. (2025). Platforms, politics, and the crisis of democracy: Connective action and the rise of illiberalism. Perspectives on Politics, 1–20. https://doi.org/10.1017/S1537592724002123

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2009). Collective action dilemmas with individual mobilization through digital networks. European Consortium for Political Research General Conference, Potsdam.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Information, Communication & Society, 15, 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2015). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. In Handbook of Digital Politics (pp. 287–338). Edward Elgar Publishing.

Berg, J. (2017). Digital democracy. In The Edinburgh Companion to the History of Democracy. Edinburgh University Press.

Berghel, H. (2016). Digital politics 2016. Computer, 49, 75–79. https://doi.org/10.1109/MC.2016.23

Bernroider, E. W. N., Harindranath, G., & Kamel, S. (2022). From connective actions in social movements to offline collective actions: An individual level perspective. Information Technology & People, 35, 205–230. https://doi.org/10.1108/ITP-08-2020-0556

Camilleri, M. A., & Camilleri, A. C. (2023). Learning from anywhere, anytime: Utilitarian motivations and facilitating conditions for mobile learning. Technology, Knowledge and Learning, 28, 1687–1705. https://doi.org/10.1007/s10758-022-09608-8

Carlisle, J. E., & Patton, R. C. (2013). Is social media changing how we understand political engagement? An analysis of Facebook and the 2008 presidential election. Political Research Quarterly, 66, 883–895. https://doi.org/10.1177/1065912913482758

Chadwick, A., & Howard, P. N. (2009). Routledge Handbook of Internet Politics. Routledge.

Chinedu-Okeke, C. F., & Obi, I. (2016). Social media as a political platform in Nigeria: A focus on electorates in south-eastern Nigeria. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 21, 6–22.

Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. Theory & Research in Social Education, 44(4), 565–607. https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549

Claassen, R. L. (2011). Political awareness and electoral campaigns: Maximum effects for minimum citizens? Political Behavior, 33, 203–223. https://doi.org/10.1007/s11109-010-9129-6

Coleman, S., & Freelon, D. (2015). Introduction: Conceptualizing digital politics. In S. Coleman & D. Freelon (Eds.), Handbook of Digital Politics (pp. 1–15). Edward Elgar Publishing.

Davis, F. D. (1985). A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems. Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology.

Deckman, M. M. (2024). The Politics of Gen Z: How the Youngest Voters Will Shape Our Democracy. Columbia University Press.

Dekoninck, H., & Schmuck, D. (2022). The mobilizing power of influencers for pro-environmental behavior intentions and political participation. Environmental Communication, 16, 458–472. https://doi.org/10.1080/17524032.2022.2027801

Durotoye, T., Goyanes, M., Berganza, R., & Gil de Zúñiga, H. (2025). Online and social media political participation: Political discussion network ties and differential social media platform effects over time. Social Science Computer Review, 1–21. https://doi.org/10.1177/08944393251332640

Earl, J., McKee Hurwitz, H., Mejia Mesinas, A., Tolan, M., & Arlotti, A. (2013). Twitter and protest policing during the Pittsburgh G20. Information, Communication & Society, 16, 459–478. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.777756

Finch, G. (1974). Participation in America: Political democracy and social equality by Sidney Verba and Norman H. Nie. Political Science Quarterly, 89, 674–676. https://doi.org/10.2307/2148474

Fox, S. (2014). Is it time to update the definition of political participation? Parliamentary Affairs, 67, 495–505. https://doi.org/10.1093/pa/gss094

Gibson, R., & Cantijoch, M. (2013). Conceptualizing and measuring participation in the age of the Internet: Is online political engagement really different to offline? Journal of Politics, 75, 701–716. https://doi.org/10.1017/S0022381613000431

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31, 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Hansson, K., Sveningsson, M., & Ganetz, H. (2024). Processes of recognition: From connective to collective action in the Swedish #MeToo movement. Feminist Media Studies, 1–18. https://doi.org/10.1080/14680777.2024.2443000

Harff, D., & Schmuck, D. (2024). Is authenticity key? Mobilization by social media influencers versus celebrities and young people's political participation. Psychology & Marketing, 41, 2757–2771. https://doi.org/10.1002/mar.22082

Harris, B. C., Foxman, M., & Partin, W. C. (2023). 'Don't make me ratio you again': How political influencers encourage platformed political participation. Social Media + Society, 9. https://doi.org/10.1177/20563051231177944

He, T., & Li, S. (2019). A comparative study of digital informal learning: The effects of digital competence and technology expectancy. British Journal of Educational Technology, 50, 1744–1758. https://doi.org/10.1111/bjet.12778

Hooghe, M. (2014). Defining political participation: How to pinpoint an elusive target? Acta Politica, 49, 337–348. https://doi.org/10.1057/ap.2014.7

Huda, M. N., & Amin, K. (2023). Understanding the intention to use LAPOR application as e-democracy in Indonesia: An integrating ECM and UTAUT perspective. eJournal of eDemocracy and Open Government, 15, 22–47. https://doi.org/10.29379/jedem.v15i1.786

Jain, V., & Jain, P. (2022). From Industry 4.0 to Education 4.0: Acceptance and use of videoconferencing applications in higher education of Oman. Journal of Applied Research in Higher Education, 14, 1079–1098. https://doi.org/10.1108/JARHE-10-2020-0378

Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2016). Defining and measuring youth digital citizenship. New Media & Society, 18(9), 2063–2079. https://doi.org/10.1177/1461444815577797

Kabakus, A. K., Bahcekapili, E., & Ayaz, A. (2023). The effect of digital literacy on technology acceptance: An evaluation on administrative staff in higher education. Journal of Information Science, 51, 930–941. https://doi.org/10.1177/01655515231160028

Kabra, G., Ramesh, A., Akhtar, P., & Dash, M. K. (2017). Understanding behavioural intention to use information technology: Insights from humanitarian practitioners. Telematics and Informatics, 34, 1250–1261. https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.05.010

Kanagavel, R., & Chandrasekaran, V. (2014). Creating political awareness through social networking: An empirical study with special reference to Tamil Nadu elections, 2011. Journal of Social Media Studies, 1, 71–81. https://doi.org/10.15340/214733661177

Karatzogianni, A., Ong, J., Kuntsman, A., & Xin, L. (2023). Digital politics: Defining, exploring and challenging the field. In Digital Politics, Digital Histories, Digital Futures (pp. 11–23). Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/978-1-80382-201-320231002

Karpf, D. (2017). Digital politics after Trump. Annals of the International Communication Association, 41, 198–207. https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1316675

Kasimov, A. (2025). Decentralized hate: Sustained connective action in online far-right community. Social Movement Studies, 24, 199–217. https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2204427

Kim, D. K. D., & Kim, I. (2025). Social media as a seed of connective democracy in Myanmar (Burma): Freedom of speech, contractarianism, and strategic use of social media. Social Media + Society, 11. https://doi.org/10.1177/20563051251329996

Koc-Michalska, K., & Lilleker, D. G. (2019). Digital Politics: Mobilization, Engagement and Participation. Routledge.

Lai, R., & Beh, L. S. (2025). The impact of political efficacy on citizens' e-participation in digital government. Administrative Sciences, 15, 1–23. https://doi.org/10.3390/admsci15010017

Lee, S., Nanz, A., & Heiss, R. (2022). Platform-dependent effects of incidental exposure to political news on political knowledge and political participation. Computers in Human Behavior, 127, 107048. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107048

Leong, C., Faik, I., Tan, F. T. C., Tan, B., & Khoo, Y. H. (2020). Digital organizing of a global social movement: From connective to collective action. Information and Organization, 30, 100324. https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2020.100324

Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. New Media & Society, 19, 657–670. https://doi.org/10.1177/1461444816686318

Lu, Y., Huang, Y. H. C., Kao, L., & Chang, Y. T. (2023). Making the long march online: Some cultural dynamics of digital political participation in three Chinese societies. International Journal of Press/Politics, 28, 160–183. https://doi.org/10.1177/19401612211028552

Lukito, J., Lee, T., Martin, Z., Glover, K., Hu, A., & Cui, Z. (2024). Connective action in Myanmar: A mixed-method analysis of spring revolution. Information, Communication & Society, 27, 1422–1440. https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2289973

McCargo, D. (2021). Disruptors' dilemma? Thailand's 2020 Gen Z protests. Critical Asian Studies, 53, 175–191. https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1876522

Micó, J.-L., & Casero-Ripollés, A. (2013). Political activism online: Organization and media relations in the case of 15M in Spain. Information, Communication & Society, 17, 858–871. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.830634

Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics? Rand McNally.

Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/7428.001.0001

Naranjo-Zolotov, M., Oliveira, T., & Casteleyn, S. (2019). Citizens' intention to use and recommend e-participation: Drawing upon UTAUT and citizen empowerment. Information Technology & People, 32, 364–386. https://doi.org/10.1108/ITP-08-2017-0257

Ohme, J., De Vreese, C. H., & Albæk, E. (2018). From theory to practice: How to apply van Deth's conceptual map in empirical political participation research. Acta Politica, 53, 367–390. https://doi.org/10.1057/s41269-017-0056-y

Parmelee, J. H., Perkins, S. C., & Beasley, B. (2022). Personalization of politicians on Instagram: What Generation Z wants to see in political posts. Information, Communication & Society, 26, 1773–1788. https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2027500

Pond, P., & Lewis, J. (2017). Riots and Twitter: Connective politics, social media and framing discourses in the digital public sphere. Information, Communication & Society, 22, 213–231. https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1366539

Reuter, O. J., & Szakonyi, D. (2015). Online social media and political awareness in authoritarian regimes. British Journal of Political Science, 45, 29–51. https://doi.org/10.1017/S0007123413000203

Rouidi, M., Elouadi, A. E., Hamdoune, A., Choujtani, K., & Chati, A. (2022). TAM-UTAUT and the acceptance of remote healthcare technologies by healthcare professionals: A systematic review. Informatics in Medicine Unlocked, 32, 101008. https://doi.org/10.1016/j.imu.2022.101008

Ruess, C., Hoffmann, C. P., Boulianne, S., & Heger, K. (2021). Online political participation: The evolution of a concept. Information, Communication & Society, 26, 1495–1512. https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.2013919

Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. Journal of Information Technology & Politics, 18, 443–454. https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. Wiley.

Showden, C. R., Barker-Clarke, E., Sligo, J., & Nairn, K. (2025). The connective is communal: Hybrid activism in online & offline spaces. Social Movement Studies, 24, 139–158. https://doi.org/10.1080/14742837.2023.2171387

Situmorang, T. P., & Ritonga, A. D. (2025). TikTok and politics: A bibliometric mapping of research trends. Studies in Media and Communication, 13, 212. https://doi.org/10.11114/smc.v13i3.7616

Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2012). Political communication and influence through microblogging—An empirical analysis of sentiment in Twitter messages and retweet behavior. 45th Hawaii International Conference on System Sciences, 3500–3509.

Szymkowiak, A., Melović, B., Dabić, M., Jeganathan, K., & Kundi, G. S. (2021). Information technology and Gen Z: The role of teachers, the Internet, and technology in the education of young people. Technology in Society, 65, 101565. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101565

Theocharis, Y., Boulianne, S., Koc-Michalska, K., & Bimber, B. (2023). Platform affordances and political participation: How social media reshape political engagement. West European Politics, 46, 788–811. https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2087410

Theocharis, Y., & Van Deth, J. W. (2017). Political Participation in a Changing World: Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Citizen Engagement. Routledge.

Tseng, T. H., Lin, S., Wang, Y. S., & Liu, H. X. (2022). Investigating teachers' adoption of MOOCs: The perspective of UTAUT2. Interactive Learning Environments, 30, 635–650. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674888

Turner, A. (2015). Generation Z: Technology and social interest. Journal of Individual Psychology, 71, 103–113. https://doi.org/10.1353/jip.2015.0021

Van Deth, J. W. (2014). A conceptual map of political participation. Acta Politica, 49, 349–367. https://doi.org/10.1057/ap.2014.6

Venkatesh, V. (2022). Adoption and use of AI tools: A research agenda grounded in UTAUT. Annals of Operations Research, 308, 641–652. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03918-9

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46, 186–204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27, 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly, 36, 157–178. https://doi.org/10.2307/41410412

Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2016). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. Journal of the Association for Information Systems, 17, 328–376. https://doi.org/10.17705/1jais.00428

Williams, M. L. (2021). Students' perceptions of the adoption and use of social media in academic libraries: A UTAUT study. Communication, 47, 76–94. https://doi.org/10.1080/02500167.2021.1876123

Zagidullin, M., Aziz, N., & Kozhakhmet, S. (2021). Government policies and attitudes to social media use among users in Turkey: The role of awareness of policies, political involvement, online trust, and party identification. Technology in Society, 67, 101708. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101708